



---

**STUDY KASUS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR  
BERSEKA OLEH PEMERINTAH DESA SELAMANIK  
KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS****Nizar Faiz Alfarizi<sup>1</sup>, Rindu Garvera<sup>2</sup>, Asep Nurdin<sup>3</sup>**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS GALUH

Jln.REMartadinataNo150CiamisFisipUniversitasGaluh

[nizar\\_faiz@student.unigal.ac.id](mailto:nizar_faiz@student.unigal.ac.id)

**Abstrak** Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Program Lembur Berseka Oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Lembur Berseka Oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Implementasi Program Lembur Berseka oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal dilihat dari indikator Ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya jelas dan terukur. Ketidakjelasan indikator keberhasilan program menyebabkan para pelaksana kesulitan dalam menentukan arah dan tolok ukur kinerja, sehingga pelaksanaan program tidak dapat dievaluasi secara objektif dan terstruktur. Keterbatasan sumber daya baik dari aspek materiil maupun sumber daya manusia, menjadi hambatan signifikan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya tenaga pelaksana yang kompeten menyebabkan program tidak berjalan secara maksimal. Dalam banyak kasus, pelaksana harus mengandalkan kemampuan seadanya, sehingga berbagai target kegiatan tidak tercapai secara optimal. Karakteristik agen pelaksana belum optimal karena kurangnya komunikasi yang efektif antar organisasi serta lemahnya koordinasi antar pelaksana menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas, ketidaksesuaian informasi, hingga rendahnya sinergi antar pihak yang terlibat. Padahal, implementasi program desa semestinya melibatkan kerja sama yang erat antara perangkat desa, lembaga masyarakat, dan kelompok sasaran program. Faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, dinamika sosial yang cepat berubah, serta minimnya dukungan politik dari berbagai pihak, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Lembur Berseka. Ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi, partisipasi mereka dalam program desa cenderung menurun. Begitupula ketika tidak ada dukungan yang memadai dari aktor politik lokal, maka legitimasi dan keberlanjutan program menjadi kurang kuat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Lembur Berseka**PENDAHULUAN**

Manusia dengan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun manusia cenderung mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingannya tanpamemperhatikan kelestarian lingkungan. Diakui bersama bahwa lingkungan kita saat ini termasuk dalam kondisi krisis, tidak hanya bentuk krisis lingkungan fisik seperti krisis air, tanah, udara bahkan iklim. Tetapi juga krisis lingkungan biologis dan tentunya, lingkungan sosial. Krisis lingkungan biologis terlihat dari semakin tidak produktifnya tanah-tanah pertanian, semakin punahnya tumbuh-tumbuhan dan satwa-satwa langka disekitar kita. Sedangkan krisis sosial yang terjadi pada saat ini adalah memudarnya

kepedulian terhadap lingkungan pada akhirnya menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan yang berakibat pada kehidupan manusia.

Permasalahan lingkungan yang selama ini terjadi harus segera ditanggulangi. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu melalui pembentukan karakter peduli lingkungan. Dikti (Uno dan Mohamad, 2011;136) mengemukakan bahwa menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur kurang memahami arti kualitas lingkungan untuk kelestarian umat manusia, sulit dilakukan. Dari permasalahan tersebut peran masyarakat sangat diperlukan dalam pengolahan lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang selama ini terjadi harus segera ditanggulangi. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu melalui pembentukan karakter peduli lingkungan.

Lingkungan yang bersih, aman dan nyaman merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat suatu wilayah atau desa, baik dari segi tingkat kesehatan, pendidikan maupun perkembangan psikologis masyarakat yang akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat tersebut. Isu lingkungan yang kotor, pengelolaan sampah yang tidak tepat, sungai-sungai yang sudah mulai kotor, tingkat polusi udara yang tinggi, tingkat keamanan yang rendah dan ketidaknyaman banyak ditemui jumpai di berbagai daerah. Oleh karena itu perlu perhatian yang cukup serius, dan banyak daerah sudah mulai berbenah terkait dengan permasalahan tersebut antara lain dengan cara menanamkan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun keterlibatan secara langsung dalam pengkondisian lingkungan melalui program-program terkait. (Putra, Amaru, Kurniawati, & dkk, 2019)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Setiap orang wajib menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik, karena lingkungan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. (Irwan, 2019:98) mengatakan: "Saat ini masalah lingkungan semakin banyak yang timbul tidak terkendali". Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Semua aktivitas yang dilakukan manusia pada akhirnya memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan adalah masalah perilaku manusia.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Program Lembur Berseka oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam program lembur berseka masih kurang. Contohnya kurangnya sosialisasi secara rutin mengenai manfaat program lembur berseka.

2. Masih kurangnya dukungan sumber daya anggaran dalam program lembur berseka. Hal ini terlihat dari anggaran yang kurang sehingga hanya mengandalkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program lembur berseka karena selama ini program lembur berseka hanya mengandalkan iuran warga.

3. Masih kurangnya evaluasi yang dilakukan terhadap kelangsungan program. Hal ini terlihat dari kurangnya perbaikan-perbaikan terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program namun hal ini belum ada cara untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan indikator masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR BERSEKA OLEH PEMERINTAH DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama di dalam sebuah penerapan suatu program, baik itu program di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, dan lainnya. Hal ini karena, implementasi program merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan suatu kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.

Menurut Mulyadi (2015:12) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan berpacu terhadap tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disetujui dalam suatu keputusan. Ini merupakan suatu tindakan untuk mengubah suatu keputusan menjadi pola operasional dan untuk mencapai suatu perubahan yang telah disetujui sebelumnya.

Menurut Wahab (2018: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang berpacu kepada pedoman yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi,

khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Waluyo, (2017:49) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2022: 151) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

#### 2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

#### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

#### 4. Sikap/ Kecendrungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin

terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembur Berseka merupakan program inovasi strategis Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang dilandasi oleh dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Bab II Pasal 3 Lembur Berseka ini bertujuan mewujudkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dan sektor lain yang berkaitan serta bertanggung jawab atas upaya peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sejak dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Lembur Berseka mulai dibentuk di setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis. Untuk mencapai tujuan Lembur Berseka melibatkan berbagai sektor, yaitu pertanian, pariwisata, BKKBN, lingkungan

**STUDY KASUS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR BERSEKA OLEH  
PEMERINTAH DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

hidup, agama, ekonomi dan sosial. Lembur berseka juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Program Lembur Berseka oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam program lembur berseka masih kurang. Contohnya kurangnya sosialisasi secara rutin mengenai manfaat program lembur berseka.
2. Masih kurangnya dukungan sumber daya anggaran dalam program lembur berseka. Hal ini terlihat dari anggaran yang kurang sehingga hanya mengandalkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program lembur berseka karena selama ini program lembur berseka hanya mengandalkan iuran warga.
3. Masih kurangnya evaluasi yang dilakukan terhadap kelangsungan program. Hal ini terlihat dari kurangnya perbaikan-perbaikan terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program namun hal ini belum ada cara untuk menyelesaikannya.

Lembur Berseka merupakan program inovasi strategis Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang dilandasi oleh dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Bab II Pasal 3 Lembur Berseka ini bertujuan mewujudkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dan sektor lain yang berkaitan serta bertanggung jawab atas upaya peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sejak dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Lembur Berseka mulai dibentuk di setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis. Untuk mencapai tujuan Lembur Berseka melibatkan berbagai sektor, yaitu pertanian, pariwisata, BKKBN, lingkungan hidup, agama, ekonomi dan sosial. Lembur berseka juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Program Lembur Berseka oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam program lembur berseka masih kurang. Contohnya kurangnya sosialisasi secara rutin mengenai manfaat program lembur berseka.

**STUDY KASUS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR BERSEKA OLEH  
PEMERINTAH DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

2. Masih kurangnya dukungan sumber daya anggaran dalam program lembur berseka. Hal ini terlihat dari anggaran yang kurang sehingga hanya mengandalkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program lembur berseka karena selama ini program lembur berseka hanya mengandalkan iuran warga.

3. Masih kurangnya evaluasi yang dilakukan terhadap kelangsungan program. Hal ini terlihat dari kurangnya perbaikan-perbaikan terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program namun hal ini belum ada cara untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan indikator masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR BERSEKA OLEH PEMERINTAH DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS".

Program Lembur Berseka (Lembur Bersih, Sehat, dan Tertata) merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat desa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata. Program ini mengintegrasikan aspek kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Di Desa Selamanik, khususnya Dusun Cikembang, program ini diimplementasikan dengan nama "Lembur Berseka Bima Sakti". Dusun ini dikenal sebagai kampung terbersih dan paling tertata, serta menjadi percontohan bagi kampung lain di wilayah Kecamatan Cipaku. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendidik masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara atau mekanisme dalam melaksanakan program Lembur Berseka di Desa Selamanik belum optimal karena adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan program serta kurangnya dukungan dari pemerintah desa sehingga menyebabkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program lembur berseka masih kurang memadai.

Subarsono (2011:90) menyatakan bahwa

Tata cara/mekanisme pelaksanaan kebijakan melibatkan koordinasi antar lembaga, penyesuaian struktur organisasi, dan komunikasi yang efektif antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Ini penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara maksud kebijakan dengan implementasinya di lapangan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan pendapat tersebut karena dalam pelaksanaan program Lembur Berseka di Desa Selamanik kurang dilaksanakan sesuai dengan tata cara/mekanisme yang telah direncanakan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan warga masyarakat serta kurang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan sebagai komitmen dalam melaksanakan program lembur berseka. Oleh karena itu pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi, penguatan peran RT/RW, serta pengadaan sarana pendukung secara bertahap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Lembur Berseka di Desa Selamanik belum memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan keterbatasan fasilitas yang mendukung serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara merata.

Menurut Nugroho (2011:70) menyatakan bahwa:

Dampak positif terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian mengenai manfaat bagi masyarakat dengan adanya program lembur berseka hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program sehingga pemahaman masyarakat terhadap program masih kurang serta kurangnya dukungan yang diberikan kepada masyarakat seperti ketersediaan fasilitas atau sarana yang belum mendukung.

Hasil penelitian mengenai dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program Lembur Berseka di Desa Selamanik belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kejelasan mengenai mekanisme dan tujuan kebijakan secara jelas serta kurangnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dampak program kurang memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti dengan peningkatan dalam hal penyediaan fasilitas pendukung, perluasan jangkauan sosialisasi, dan evaluasi berkelanjutan agar seluruh warga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program secara merata dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Winarno (2022:112) yang menyatakan bahwa:

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan yang dapat diterjemahkan secara konkret oleh pelaksana di lapangan, sehingga pelaksanaan program tidak hanya formalitas tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian dan pendapat tersebut karena pelaksanaan program lembur berseka belum sesuai dengan ukuran atau tujuan kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat serta kurangnya koordinasi dengan para ketua RT dan RW mengenai kegiatan yang dilaksanakan sehingga menyebabkan keikutsertaan masyarakat dalam Program Lembur Berseka di Desa Selamanik masih kurang, Selain itu kurang tercapainya tujuan kebijakan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat hal ini

**STUDY KASUS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR BERSEKA OLEH  
PEMERINTAH DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

dikarenakan kurangnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat program lembur berseka sehingga kurang dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Lembur Berseka oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Program Lembur Berseka oleh Pemerintah Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya jelas dan terukur. Ketidakjelasan indikator maupun keberhasilan program, menyebabkan para pelaksana kesulitan dalam menentukan arah dan tolok ukur kinerja, sehingga pelaksanaan program tidak dapat dievaluasi secara objektif dan terstruktur.
2. Keterbatasan sumber daya baik dari aspek materiil maupun sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya tenaga pelaksana yang kompeten menyebabkan program tidak berjalan secara maksimal. Dalam banyak kasus, pelaksana harus mengandalkan kemampuan seadanya, sehingga berbagai target kegiatan tidak tercapai secara optimal.
3. Karakteristik agen pelaksana belum optimal karena kurangnya komunikasi yang efektif antar organisasi serta lemahnya koordinasi antar pelaksana menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas, ketidaksesuaian informasi, hingga rendahnya sinergi antar pihak yang terlibat. Padahal, implementasi program desa semestinya melibatkan kerja sama yang erat antara perangkat desa, lembaga masyarakat, dan kelompok sasaran program.
4. Faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, dinamika sosial yang cepat berubah, serta minimnya dukungan politik dari berbagai pihak, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Lembur Berseka. Ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi, partisipasi mereka dalam program desa cenderung menurun. Begitu pula ketika tidak ada dukungan yang memadai dari aktor politik lokal, maka legitimasi dan keberlanjutan program menjadi kurang kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku :**

- Winarno, S. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad. 2011. *Belajar dengan Pendekatan PAIKEM*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

**STUDY KASUS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBUR BERSEKA OLEH  
PEMERINTAH DESA SELAMANIK KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

Irwan, Zoer'aini Djamal, 2019. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

**Sumber Buku :**

Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Ke-2. Bandung:CV. Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.

Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad. 2011. *Belajar dengan Pendekatan PAIKEM*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Irwan, Zoer'aini Djamal, 2019. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.